SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;

b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan;

c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road*

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.4-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain :

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
2. Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
3. Menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor: DIPA 076.01.2.65716/2025, yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agung Siswanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	**Manajemen Perubahan**	1 Perencanaan Reformasi Birokrasi	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.	1 SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.	√												
			2 Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi	2 Kegiatan *kick off* / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat													
			3 Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di	3 Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten	√	√											
		2 Pelaksanaan manajemen perubahan	1 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	1 Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang bisa diakses stakholder internal dan eksternal;		√			√			√			√		
				2 Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo di website resmi yang berisikan dokumentasi / pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1 Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;				√				√					
				2 Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN;												V	
			3 Penyelenggaraan Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo:														
			1) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu;	1 Persentase (%) penandatangan Pakta Integritas bagi Anggota dan ASN	√												
			2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun;	2 Persentase (%) pelaporan LHKPN						√						√	
			3) Pelaksanaan managemen benturan kepentingan	3 Persentase (%) pelaporan LHKASN						√						√	
			4 Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;			√						√				
				2 Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			5 Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1 Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2 Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;						√						√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	1 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.						√						√	
			2 Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo)	1 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√					√							
				2 Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KPU Kabupaten Sukoharjo					√								
			3 Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo kepada:	1 Tim RB KPU RI menerima pelaporan:	√												
			1) Tim pengarah di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	a. SK Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor;	√	√											
			2) Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo	b. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;		√										√	
2	**Penguatan Peraturan Perundang Undangan/Deregulasi Kebijakan**	1 Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Adanya data perundang undangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√					√						√	
		2 Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di Revisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4 Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.	√	√											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		5 Pengelolaan JDIH	1 Pembangunan JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Dapat diaksesnya JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo	2 Updatenya data JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	**Penguatan Kelembagaan**	1 Evaluasi Organisasi	1 FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi;			√			√			√			√	
			2 Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	2 Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI dan Kemenpan RB						√						√	
		2 Penyesuaian SOTK	1 Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai mandat.	1 SOTK KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai mandat.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo	2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	**Penguatan Tata Laksana**	1 Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	1 Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;	√	√	√										
				2 tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;													
				3 Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan													
				4 Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi				√									
			3 Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3 SOP sudah dilegalkan; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4 Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4 Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	1 Adanya kebijakan pendukung PID;			√			√			√			√	
			1 Penyampaian Kebijakan/Maklumat Layanan/Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	2 Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	3 Meningkatnya kepuasan layanan PID;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3 Pengelolaan PPID dan ePPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	4 Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4 Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID	5 Jumlah sengketa informasi;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5 Survei kepuasan pemohon informasi	6 Adanya rekomendasi/pelaksanan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				7 Indeks kepuasan pemohon informasi.													
		3 Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo:	1 Kebijakan internal tata kelola SPBE			√										
			1) Pembangunan aplikasi inovatif/transformasi Proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk diteplikasi di satuan kerja lain;	2 Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)													
			2) Strategi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK;	3 Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi;	4 Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;													
			4) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, ebudgeting)	5 Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				6 Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan:	1 Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1) Aplikasi tata naskah dinas	2 Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian	3 Terisinya data aplikasi Manajemen Perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Aplikasi Perencanaan	4 Terisinya data aplikasi Penganggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4) Aplikasi penganggaran	5 Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5) Aplikasi Keuangan	6 Terisinya aplikasi manajemen kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6) Aplikasi Manajemen Kinerja	7 % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			7) Aplikasi Pengadaan														
			3 Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik:														
			1) Layanan pengaduan Publik	1 Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2 Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Layanan Whistle Blowing System (WBS)	3 Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4) Layanan Kepemiluan	4 Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta:													
				1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi													
			5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	5 Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID KPU Kabupaten Sukoharjo oleh publik.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4 Penerapan sistem kearsipan yang handal	1 Penerapan sistem arsip	1 Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Kerjasama dengan arsip daerah	2 Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3 Terdokumentasinya arsip vital													
5	**Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN**	1 Pembangunan Sistem Merit	1 Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1 Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3 Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/ Cascading	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4 Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu						√							
				5 Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP												√	
				6 Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment												√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Penerapan assessment untuk pertimbangan pengembangan kasir dan mutasi pegawai	1 Data Mutasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Data Promosi													
				3 Data Peserta Assessment													
			3 Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1 Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Jumlah Pelanggaran tahun ini													
				3 Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman													
			4 Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja	√												
			5 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1 Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo													
				2 Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi													
			6 Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan													
			7 Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo													
		2 Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung KPU Kabupaten Sukoharjo	√												
6	**Penguatan Akuntabilitas Kinerja**	1 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Penyusunan dan penetapan Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo	Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Revin Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo	Renstra hasil revin			√										
			3 Penetapan Kinerja dengan menerapkan *reward and punishment*	1 Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV	√												
				2 % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian *Reward & Punishment*													
				3 Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	√												
			4 Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1 Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan 3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	√												
				4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi													
				2 Persentase sasaran Kinerja:													
				1) Jumlah Sasaran Kinerja													
				2) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih													
				3 Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:													
				1] Jumlah anggaran total													
				2] Jumlah anggaran yang berhasil direfocusing													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			5 Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran													
			6 Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo	% Capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo			√			√			√			√	
			7 Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo			√			√			√			√	
				2 Reviu Lakip KPU Kabupaten Sukoharjo		√											
			8 Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo	Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo tepat waktu												√	
		2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1 Pemutakhiran data kinerja di aplikasi ELapkin;	1 Terisinya aplikasi eLapkin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Data e-Lapkin KPU Kabupaten Sukoharjo termutakhir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja; dan	1 % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Pengelola PPBJ bersertifikat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja;														
			1) JF Analis Pengelola Keuangan APBN	1 % Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN													
7	**Penguatan Pengawasan**	1 Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	1 Terbentuknya Tim Zona integritas;	√												
				2 Di tandatanganinya Piagam integritas oleh pere pihak dan saksi; dan													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3 Masuknya KPU Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian WBK/WBBM.													
			2 Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalkan.	√												
			3 Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	1) Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas; dan						√						√	
				2) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas						√						√	
			4 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	1 Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI													
				2 % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI													
				3 Melaporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan													
			5 Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	1 Terisinya LKE ZI; dan													
				2 Terisinya PMPRB ZI bagi KPU Kabupaten yang di tunjuk													
		2 Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU	1 Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi;	1 Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	√												
				2 Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo; dan	√												
				3 Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;													
			3 *Public Campaign* Anti Gratifikasi;	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1 Laporan pengendalian gratifikasi													
				2 Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan													
		3 Pelaksanaan Whistle *Blowing System* KPU	1 Pembangunan aplikasi Whistle Blowing System di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik													
				2 Adanya SOP WBS													
				3 Adanya Pengelola WBS													
			2 Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti													
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4 Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1 Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.													
			2 Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	% Penandatangan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;													
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.													
		5 Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Adanya tim SPIP pada KPU Kabupaten Sukoharjo	√												
			2 Pelaksanaan SPIP:	Terselenggaranya:	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1) Lingkungan pengendalian	1) Lingkungan pengendalian													
			2) Penilaian risiko	2) Penilaian risiko													
			3) Kegiatan pengendalian	3) Kegiatan pengendalian													
			4) Informasi dan komunikasi	4) Informasi dan komunikasi													
			5) Pemantauan pengendalian intern	5) Pemantauan pengendalian intern													
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP.	Pelaporan Bulan Kendali tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		6 Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1 Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Tersedianya sarana penyampaian pengaduan,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Adanya pejabat yang mengelola pengaduan;	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3 Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan;	√												
				4 Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;													
			2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat													
		7 Peningkatan Integritas Individu	1 Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√												
			2 Penyampaian LHKASN	100% LHKASN di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√												
		8 Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	1 Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	√												
			2 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan pengadaan barang/jasa	√					√						√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	1 Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo baik kepada internal dan eksternal;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi:	1 Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan)													
			1) Dasar hukum;	2 Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo		√											
			2) Persyaratan Layanan;	3 Indeks kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan;	√												
			3) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;	4 Jumlah sengketa pelayanan menurun;						√	√	√	√	√	√	√	
			4) Jangka waktu penyelesaian layanan;	5 Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5) Biaya/ tarif;	6 Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6) Produk layanan;	7 Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			7) Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;														

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			8) Kompetensi pelaksana														
			9) Pengawasan internal;														
			10)Penanganan pengaduan, saran dan masukan;														
			11)Jumlah pelaksana;														
			12)Jaminan pelayanan;														
			13)Jaminan keamanan;														
			14)Evaluasi kinerja pelaksana;														
			3. Tools evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022	Penilaian kinerja.													
		2. Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	1. Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal:	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan.		√					√						
			1) Kesesuaian Persyaratan	2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan;													
			2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3) Adanya SOP Pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Kecepatan Waktu Penyelesaian	4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar	5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo baik kepada internal dan eksternal;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6) Kompetensi Pelaksana														
			7) Perilaku Petugas														

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			8) Kualitas Sarana dan prasarana														
			9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan														
			2 Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan;	1 Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.													
				2 Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.													
			3 Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik pada pelayanan ke KPU Kabupaten Sukoharjo;	1 Adanya sosialisasi inovasi													
				2 *Benchlearning* dari unit/satker lain terkait hasil inovasi;													
		3 Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	Membangun dan menerapkan variabel dan														
			1 Standar Pelayanan:	1 Tersedianya Standar pelayanan sesuai amanat UU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1) Prasyarat layanan														
			2) Sistem Mekanisme Prosedur														
			3) Produk Layanan														
			4) Jangka waktu penyelesaian														
			5) Biaya/tarif														
			2 Maklumat pelayanan	2 Tersedianya Maklumat Pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Sistem informasi pelayanan publik	3 Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4 Sarana prasarana dan fasilitas	4 Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5 Pelayanan Khusus kepada:	5 Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1) Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll)														
			2) Ketersediaan pelayanan kusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus														
			6 Pengelolaan Pengaduan	6 Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan													
			1) Ketersediaan sarana pengaduan														
			2) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan;														
			3) Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan;														
			7 Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan	7 Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya;							√						
			8 Visi, Misi dan Motto Pelayanan;	8 Tersedianya visi, misi dan motto pelayanan													
			1) Ketersediaan visi dan misi pelayanan														
			2) Ketersediaan motto pelayanan														
			9 Atribut Perlayanan:	9 Atribut layanan dapat terlihat publik													
			1) berupa kartu identitas petugas;														
			2) Kartu tamu;														
			3) Buku tamu;														
			4) Petunjuk arah ruang layanan														
			10 Pelayanan terpadu satu pintu.	10 Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4 Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1 Pembangunan Kerja Sama														
			2 Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		5 Penerapan *reward and punishment* dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan *reward and punishment* dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian *reward and punishment* dalam pelayanan													

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agung Siswanto